

## KBI Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Antipenyuapan

Tanggal : Rabu , 16 September 2020

Media : Investor Daily

Halaman : 17

Wartawan : der

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Fajar Wibhiyadi (*Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia*), Mas Achmad Daniri (*Dirut Bursa Efek Jakarta 1999-2002*)

Rubrik : Markets & Corporate

Topik : Anti Penyipuan

# KBI Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Antipenyuapan

JAKARTA – PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan dari British Standards Institution (BSI). Sertifikasi ini merupakan bagian dari peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di KBI.

Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengatakan, ini merupakan bentuk nyata dari upaya KBI dalam menjaga korporasi dari tindakan yang merugikan, baik untuk KBI maupun pemangku kepentingan. “Sertifikasi yang didapat KBI ini meliputi sistem manajemen anti-suap di bidang keuangan, audit internal dan kepatuhan, manusia sumber

daya, urusan umum dan pengadaan, teknologi informasi, operasi, sekretaris perusahaan dan bisnis kecuali untuk usaha penjaminan emisi,” kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (15/9).

Fajar menegaskan, dalam konteks GCG, implementasi anti penyipuan khususnya dalam *Whistleblowing System* (WBS) sendiri merupakan bagian dari 11 pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Sebagai bagian dari sertifikasi ISO 37001:2016 ini, KBI telah mengeluarkan kebijakan anti penyipuan khususnya terkait WBS.

Adapun dalam kebijakan tersebut, diatur bagaimana mekanisme WBS, apabila pelanggaran dilakukan oleh karyawan, direksi

bahkan oleh komisaris. Targetnya adalah *zero tolerance* terkait penyipuan, dan hal itu berlaku untuk semua yang ada dilingkungan KBI.

Fajar menambahkan, dengan penerapan ISO 37001:2016, target jangka panjang KBI adalah meningkatkan layanan dan nilai tambah ekonomis para pemangku kepentingan. Dalam implementasinya, KBI akan mengajak semua pemangku kepentingan khususnya mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan ISO 37001:2016. “Selain itu, bagi kami yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), implementasi ISO 37001 :2016 merupakan implementasi dari *core value* BUMN yaitu AKHLAK, yang dalam hal ini

adalah Amanah,” jelas Fajar.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (2019) Mas Achmad Daniri mengatakan, sistem manajemen anti penyipuan sangat terkait dengan implementasi GCG. ISO 37001:2016 merupakan perangkat teknis penerapan prinsip-prinsip GCG yang disingkat TARIF, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness. Pemenuhan ISO 37001: 2016, merupakan langkah mendasar bagi KBI guna mendorong implementasi GCG di KBI menjadi lebih baik. “Tantangan berikutnya adalah upaya KBI untuk membudayakan GCG dalam seluruh kegiatan operasional korporasi,” ujarnya. **(der)**